**MODEL PEMBIAYAAN DAERAH YANG BERSUMBER**

**DARI ANGGARAN NON APBN UNTUKMENINGKATKAN**

**EKONOMI KREATIF**

Nama : Bisma Akbar Wahyu TriPutra

Nim : 162010200102

Kelas : MJ/B3 semester 4

**Abstract**

In Rule No. 33 of 2004, the financial resources come from local revenue (PAD), the balance funds, loan area, and acceptance of others are legitimate. PAD is consist of; tax, retribution, part profit enterprises, but it is also coupled with tax revenues and non-tax, consisting of; sharing Land and Building Tax (PBB), income tax, natural resources, is still far from sufficient to finance government expenditure to total revenue when compared to the magnitude of transfers from the central government There are several models for the local financing through the issuance of municipal bonds and ensure the participation of the business community as part of the stakeholders in the area to engage more actively in finding solutions to the fiscal problems of the area. Increased cooperation between government and the private sector through schemes such as Public Private Partnership (PPP) or hereinafter referred to as Public Private Partnership (PPP) scheme and Corporate Social Responsibility (CSR) should be continue to support of all stakeholders in order to improve the creative econom.

**KOMENTAR**

Dari jurnal ini kita mengetahui bahwa suatu daerah mampu mendapatkan pembiayaan otonomi dari kekayaan daerah tersebut. Dari hal ini tiap daerah memiliki sumber-sumber melimpah yang berbeda-beda dan memiliki ke-unikan yang berbeda. Karena jika hanya mengandalkan anggaran APBD yang terkadang macet atau lama akan mempersulit jalannya organisasi di daerah tersebut. Namun dalam bekerja sama dengan pihak swasta ini terkadang butuh kewaspadaan karena takutnya akan ada oknum luar yang tidak bertanggung jawab, selebihnya jurnal ini telah membeberkan sumber, penghitungan hasil daerah, dan jenis-jenis obligasi pemerintah di daerah.

**Daftar Pustaka**

*Sriyono, Sriyono (2017) MODEL PEMBIAYAAN DAERAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN NON APBN UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI KREATIF. SEMINAR NASIONAL, Universitas Muhammadiyah, Gresik, 29-30 Juni 2013.*

*America’s National Council on Public Private Partnership (http://www.NCPPP.org).*

*Basri, Faisal H. 2000. Tantangan dan Peluang Otonomi Daerah, Jurnal Pada Lintasan*

*Ekonomi, Volume XVII, Nomor I, Juli-Desember 2000, Lembaga Penerbitan dan*

*Puublikasi Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang.*

*Bult-Spiering, M. & Dewulf, G. (2006), Strategic Issues in Public-Private Partnerships : An*

*International Perspective. Blackwell Publishing Ltd, Oxford.*

*SEMINAR NASIONAL, Universitas Muhammadiyah, Gresik, 29-30 Juni 2013*

*Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2005. Studi Penyusunan Draft Peraturan*

*Mengenai Pedoman Penerbitan Obligasi Daerah. Jakarta*

*Direktorat Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta Bappenas. 2008. KPS –*

*Kemitraan Prasarana dan sarana Mengamankan Investasi Jalan Tol.*

*Djunedi, Praptono. 2007. Implementasi Public-Private Partnership dan Dampaknya ke APBN.*

*Majalah Warta Anggaran, Edisi 6 Tahun 2007*

*Elmi, Bachrul, 2002, Hutang Sebagai Salah Satu Sumber Pembiayaan Pembangunan*

*Daerah, Makalah Kajian Ekonomi Keuangan.*

*Elmi, Bachrul. 2005. Analisa Obligasi Untuk Membiayai Pembangunan Daerah (Municipal*

*Bonda) Kasus Pemda Propinsi Jawa Barat. Working Paper.*

*Halim, Abdul., (2001). Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Jogjakarta: UPP AMP*

*YKPN.*

*Kotler, Phillip (2005), Corporate Social Responsibility, Hokoben, New Jersey, John Willey &*

*Sons, Inc*

*Kurniawan, Eri Setianto, Pudjianto, Bambang dkk. 2009. Analisis Potensi Penerapan*

*Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) Dalam Pengembangan Infrastruktur*

*Transportasi Di Perkotaan (Studi Kasus Kota Semarang). TEKNIK : Vol. 30, No 3 :*

*147-155*

*Ladjin, Nurjanaa. 2008. Analisis Kemandirian Fiskal di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus di*

*Propinsi Sulawesi Tengah). Semarang : Program Pasca Sarjana Universitas*

*Diponegoro*

*Laboratorium Pengkajian Ekonomi Pembangunan (LPEP), 2011, Alternatif Sumber-Sumber*

*Pembanguanan Pembiayaan Daerah, Airlangga, Surabaya*

*Landiyanto, Erlangga Agustino. 2005. Kinerja Keuangan dan Strategi Pembangunan Kota di*

*Era Otonomi Daerah : Studi Kasus Kota Surabaya.Cures Working Paper : No 05/01*

*Musgrave, Richard A Dan Peggy Musgrave. 1993. Public Finance in Theory and Practice, MCGraw*

*Hill Kogakustha Ltd, Tokyo.*

*Okta, Dewi dan David Kaluge, Analisis Peuang obligasi daeran sebagai sumber alternatif*

*pembiayaan Derah, Journal Indonesia apply of economics, Vol 5, No 2, Oktober 2011,*

*157-171*

*Partisipasi Standar Internasional. 2007. ISO 26000 On Social Responsibility.*

*Purwoko. 2005. Analisis Peluang Penerbitan Obligasi Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan*

*Infrastruktur Daerah. Kajian Ekonomi dan Keuangan. Edisi Khusus.*

*Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal, 2008, Study of Central Government Guarantee Provision for*

*Regional Public-Private Partnerships (PP) Infrastructure Projects in Indonesia.*

*SEMINAR NASIONAL, Universitas Muhammadiyah, Gresik, 29-30 Juni 2013*

*Sriyono, Sriyono dan Farida Lestari (2013), Pengaruh Teamwork, Kepuasan Kerja, dan*

*Loyalitas Terhadap Produktivitas pada Perusahaan Jasa, Prosiding Call for*

*Paper 2013: Bidang Manajemen, Seminar Nasional Universitas*

*Muhammadiyah Sidoarjo*

*Santoso, Rokhedi P. 2003. Analisis Pinjaman Sebagai Potensi Pembiayaan Pembanguna*

*Daerah : Studi Kasus Daerah Istimewa Jogjakarta. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol.*

*8 No.2.*

*Santosa, Rokhedi P, 2003, Analisis Pinjaman Sebagai Potensi Pambiyaan Pembangunan*

*Daerah : Studi Kaus Daerah Istimewa Jogjakarta, Jurnal Ekonomi Pembangunan,vol*

*8, No 2, Desember 2003, 147- 158*

*Siregar, Chairil N. 2007. Analisis Sosiologis Terhadap Implementasi Corporate Social*

*Responsibility Pada Masyarakat IndonesiaI. Jurnal Sosioteknologi Edisi 12 Tahun.*

*Institut Pertanian Bogor.*

*Suparmoko, 2002, “Ekonomi Publik : Untuk Keuangan & Pembangunan Daerah”, Penerbit*

*Andi Yogyakarta.*

*Suwitri, Sri. Rachyuningsih, Eny, dkk. 2005. Pelayanan Publik : Public-Private Partnership*

*Percepatan Infrastruktur di Indonesia 2005-2009. “Dialogue” JIAKP : Vol. 2, No. 3 :*

*961-978*

*Thesaurianto, Kuncoro. 2007. Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian*

*Daerah. Tesis Universitas Diponegoro Semarang.*

*Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*

*Undang-undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat*

*dan Daerah*

*Wang, Catherine L. 2009. Iaffective and Continuance Commitment in Public Private*

*Partnership. Emerald Journal. ER 396.*